

BAB II

GAYA KEPEMIMPINAN DAN SIKAP DEMOKRASI

A. Gaya Kepemimpinan

1. Definisi Pemimpin

Setiap pemimpin mempunyai sifat, watak, dan karakter masing-masing yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor sifat yang dibawanya dari lahir maupun pembentukan dari lingkungan tempat dimana pemimpin itu bekerja. Sifat dan karakter pemimpin yang berbeda-beda itu lah di sebut gaya kepemimpinan. Menurut Fiedler dalam Walgito, (2003:111)” Pemimpinan adalah anggota kelompok yang mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kelompok yang berkaitan dengan tugas kelompok”.

Menurut Swanburg (1999) dalam Susatyo Herlambang, (2014:98) Kepemimpinan adalah suatu proses aktivitas untuk mempengaruhi dan mengorganisir orang lain atau kelompok dalam upaya penyusunan dan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Kartono (1998), Perbedaan pimpinan dan pemimpin yaitu, pimpinan adalah seseorang yang memberikan perintah suatu pekerjaan berdasarkan target pekerjaan yang harus diselesaikan, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan di dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat menciptakan integrasi yang serasi dengan para bawahannya juga termasuk dalam membina kerja sama, mengarahkan dan mendorong gairah kerja kelompok anggotanya sehingga tercipta motivasi positif yang akan menimbulkan niat dan usaha (kinerja) yang maksimal juga didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, jelaslah bahwa keadaan kelompok dalam rangka mencapai tujuan akan tergantung pula pada keadaan kepemimpinan seorang pemimpin. Hal ini sependapat dengan Stoner (1982) dalam Susatyo Herlambang,(2014:94) yang mengatakan bahwa “Kepemimpinan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya”.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan seorang anggota kelompok yang mengarahkan, mengkoordinasi, mempengaruhi para anggota kelompok, komunitas atau `kelompok untuk mencapai tujuan kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya.

Jadi, kepemimpinan ialah ilmu dan seni memengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Sondang P siagian (2003:5), kepemimpinan merupakan, “motor atau gaya penggerak semua sumber-sumber dan alat-alat (*resources*) yang tersedia bagi satu organisasi”. *Resources* yaitu sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sukses atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung pada kemampuan pimpinan menggerakkan sumber-sumber dan alat-alat tersebut. Hal ini sependapat dengan Stoner (1982) dalam Susatyo Herlambang, 2014:94) yang mengatakan bahwa “Kepemimpinan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya”.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama dalam suatu organisasi dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi bawahannya untuk berbuat seperti pemimpin itu kehendaki. Tujuan organisasi akan tercapai apabila pemimpin dapat mempengaruhi atau menggerakkan bawahannya untuk bekerjasama dalam sebuah organisasi.

2. Gaya Kepemimpinan

Menurut Stoner (1982) dalam (Susatyo Herlambang, 2014:94) yang mengatakan bahwa “Kepemimpinan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya”. Seorang pemimpin harus memiliki pengaruh didalam kelompok, hal ini untuk menunjukkan bahwa dia layak memimpin kelompok tersebut. Di dalam mempengaruhi kelompoknya, seorang pemimpin memiliki gaya tersendiri di dalam kepemimpinannya. Menurut Kurt Lewin, Lippit dan White (1939) dalam (Susatyo Herlambang, 2014:98) berpendapat “ada tiga macam gaya kepemimpinan sebagai berikut :

1. Gaya Kepemimpinan yang *autocratic*

Pemimpin menentukan semua kebijakan, kemudian memberikan petunjuk untuk penerapannya. Hanya pemimpinlah yang perlu memiliki wawasan menyeluruh tentang apa yang diperlu dilaksanakan. Pemimpinlah

yang menentukan langkah-langkah dan interaksi yang perlu dilaksanakan. Pemimpin yang *autocratic* sering disebut dengan birokrat.

Ciri-ciri pemimpin dengan gaya *autocratic* atau otoriter :

- a. Selalu menuntut ketaatan penuh bawahan.
- b. Disiplin kerja tinggi dan kaku.
- c. Senang member perintah dan instruksi.
- d. Pengambilan keputusan berdasarkan keinginan sendiri.
- e. Organisasi dipergunakan sebagai alat untuk tujuan pribadi dan kekuasaan.
- f. Kekuasaan bersifat sentralistik.
- g. Senang terhadap bawahan yang “menurut dan menjilat”.
- h. Kurang membina hubungan informal.
- i. Merasa hidup dan matinya organisasi tergantung dirinya.
- j. Memperlakukan bawahan sebagai alat.
- k. Penilaian kinerja bawahan didasar pada pemenuhan keinginan atasan.
- l. Sering mengkambing hitamkan bawahan.

2. Gaya kepemimpinan yang *democratic*

Pemimpin menyarankan kepada anggota kelompok untuk mengembangkan keputusannya sendiri. Anggota kelompok diberikan kebebasan melakukan kegiatan dan berinteraksi satu sama lain, pemimpin hanya memberikan wawasan kepada anggota kelompok tentang tugas kelompok yang harus dikerjakan dan langkah-langkah yang harus diambil.

Ciri-ciri pemimpin dengan gaya *democratic* :

- a. Memandang dirinya sebagai kordinator dan integrator.
- b. Pendekatan multidisipliner, holistik dan kolaboratik.
- c. Organisasi adalah wadah untuk mencapai tujuan bersama.
- d. Akomodasi perbedaan perlu untuk kelangsungan organisasi.
- e. Memperlakukan bawahan sebagai bagian terpenting dari organisasi.
- f. Pengambilan keputusan secara bermufakat, diatas perbedaan.
- g. Dihormati karena kemampuannya, bukan ditakuti.
- h. Bertanggung jawab terhadap kesalahan kolektif.
- i. Memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi.
- j. Mengutamakan kepentingan bersama.
- k. Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan seacara secara merata.

- l. Mengetahui kepentingan dan kebutuhan bawahan.
3. Gaya kepemimpinan *Laissez faire*

Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan penuh kepada kelompok. Dukungan fasilitas dan sumber daya sudah tersedia dan anggota diminta berkerja secara optimal. Pemimpin hanya bertugas memberikan tanggapan jika ada pertanyaan yang diajukan kepadanya. Pemimpin dengan gaya *laissez faire* disebut juga dengan seorang liberator.

Ciri-ciri pemimpin dengan gaya *laissez faire* :

- a. Kepemimpinan yang didasarkan atas kedekatan seorang dan keturunan.
- b. Sangat percaya terhadap bawahan, kurang peduli terhadap jalannya organisasi.
- c. Menganggap bawahan sebagai rekan kerja.
- d. Bekerja dengan tipe informal dari pada formal.
- e. Pendelegasian sangat ekstensif.
- f. Pengambilan keputusan pada tingkat bawah.
- g. Interpensi pimpinan sangat kecil.
- h. Falsafah : tiap karyawan pasti bertanggung jawab.
- i. Kurang menyukai konflik.
- j. Menyukai status quo.
- k. Tidak punya visi dan misi yang jelas.

Penggunaan tipe atau gaya kepemimpinan akan berubah secara bergantian sesuai dengan perubahan situasi yang dihadapi oleh pemimpin yang bersangkutan. Dalam situasi tenang dan dalam menghadapi masalah-masalah yang memerlukan pemikiran bersamaa antara pimpinan dan bawahan, dengan sendirinya akan dipergunakan tipe kepemimpinan demokrasi. Sebaliknya dalam situasi darurat dimana diperlukan langkah-langkah yang cepat dengan sendirinya akan menuntut dilaksanakannya kepemimpinan otokratik. Jadi kadang-kadang suatu saat pemimpin memberikan pengarahan atau perintah yang kokoh. Tetapi pada saat lain ia memberikan saran. Oleh karena itu tidak ada tipe atau gaya kepemimpinan yang lebih baik, semua tergantung pada situasi atau lingkungannya.

Indikator gaya kepemimpinan menurut Kartono (2008:34) menyatakan sebagai berikut :

1. Kemampuan mengambil keputusan
2. Kemampuan Memotivasi
3. Kemampuan berkomunikasi
4. Kemampuan mengendalikan bawahan
5. Tanggung jawab
6. Kemampuan mengendalikan emosional

3. Fungsi Kepemimpinan

Pemimpin merupakan cerminan dari anggota kelompoknya, sudah tentu untuk menjadi seorang pemimpin dituntut persyaratan-persyaratan tertentu agar dalam menjalankan kepemimpinannya dapat berlangsung dengan baik. Keberlangsungan kepemimpinan tergantung dari fungsi yang dijalankan seorang pemimpin. Menurut Ruch dalam bimo walgito (2010:103) menyatakan bahwa fungsi pemimpin sebagai berikut :

1. Memberikan struktur yang jelas dari situasi – situasi rumit yang dihadapi olehkelompoknya (*structuring the situation*).
2. Mengawasi dan menyalurkan perilaku kelompok yang dipimpinnya (*controlling group behavior*). Artinya, seorang pemimpin bertugas mengendalikan perilaku anggota kelompok dan kelompok sendiri.
3. Sebagai juru bicara kelompok yang dipimpinnya (*spokeman of the group*), seorang pmimpin harus dapat merasakan dan menerangkan kebutuhan-kebutuhan kelompok yang dipimpinnya ke dunia luar, baik mengenai sikap kelompok, tujuan kelompok, harapan-harapan, maupun hal-hal lain.

Secara lengkap dan rinci Krech dan Crutchfield (1948) dalam bimo walgito (2010:104) mengemukakan pendapat ada beberapa fungsi pemimpin, yaitu bahwa pemimpin itu sebagai :

- a. Seorang eksekutif, yaitu ikut berkiprah dalam mencapai tujuan dari kelompok, dan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan hal-hal yang telah digariskan dalam kelompok yang dipimpnnya.
- b. Seorang perencana (*planner*) yaitu, pemimpin bertugas membuat rencana kegiatan dari yang dipimpinnya. Apa yang mestinya dikerjakan kelompok perlu direncanakan, digariskan oleh pemimpin.
- c. Seorang pembuat kebijakan (*policy maker*) yaitu, pemimpin menentukan kebijakan kelompok yang dipimpinnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan.

- d. Seorang ahli (*expert*) pemimpin disamping sebagai pembuat kebijakan maka seorang pemimpin juga digunakan sebagai sumber informasi bagi anggota kelompok yang dipimpinnya. Karena itu diharapkan seorang pemimpin adalah seorang ahli didalam bidang yang dipimpinnya.
- e. Seseorang yang mewakili kelompok yang keluar (*as eksternal group refresentative*), yaitu pemimpin mewakili kelompoknya ke dunia luar kelompoknya. Pemimpin sebagai cerminan sifat-sifat atau kepribadian kelompok yang dipimpinnya.
- f. Seorang pengontrol prilaku atau hubungan para anggota (*as controller of internal relationship*) karena itu seorang pemimpin harus peka terhadap keadaan atau situasi dalam kelompoknya.
- g. Seorang penengah dan peleraai yaitu, bahwa seorang pemimpin bertugas sebagai peleraai atau penengah bila dalam kelompok terdapat perselisihan di antara para anggota dan pemimpin juga berkewajiban untuk memulihkan kembali hubungan yang kurang baik itu.
- h. Seorang panutan (*as exemplar*) yaitu seorang pemimpin harus mampu menjadi panutan, menjadi teladan baik dalam ucapan maupun perbuatan dalam perilaku dari yang dipimpinnya. Hal tersebut menyangkut kewibawaan pemimpinnya.
- i. Seorang simbol dari kelompok (*symbol of the group*) yaitu bahwa seorang pemimpin merupakan lambang dari yang dipimpinnya.
- j. Seorang pengambil alih tanggung jawab, yaitu seorang pemimpin berkewajiban mengambil tanggung jawab atas tindakan anggotanya.
- k. Seorang Idealis (*as ideologist*) yaitu seorang pemimpin perlu benar-benar memahami ideologi kelompoknya sehingga dalam memimpin, pemimpin akan sesuai dengan aspirasi yang ada dalam kelompoknya.
- l. Figur seorang ayah (*as father figure*) seorang pemimpin juga sebagai seorang “bapak” dari para anggota kelompoknya, sebagai tempat identifikasi, tempat pcurahan isi hati dari para anggota yang dipimpinnya.

Dari pendapat ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa fungsi pemimpin mencakup beberapa hal diantaranya : Pemimpin sebagai eksekutif, penengah, penganjur, sebagai ahli, perencana, pembuat kebijakan, pengontrol perilaku anggota kelompoknya, seorang panutan, seorang pemberi hadiah atau hukuman,

seorang idealis, figur seorang ayah bahkan seorang yang siap dikambing hitamkan.

4. Sifat-sifat Seorang Pemimpin Yang Baik

Seorang pemimpin akan menjadi sorotan banyak orang. Sifat dan perilaku akan dinilai oleh banyak orang. Salah sedikit citra yang dibangun akan rusak. Bukan hanya citra yang hancur, tetapi juga kepercayaan dari bawahan juga akan berkurang. Sebagai seorang pemimpin sebenarnya ada sifat-sifat khusus yang harus dijaga dan dikembangkan dalam diri.

Menurut Sondang P Siagian (2003:32-33), untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, seorang pemimpin harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki kondisi fisik yang sehat sesuai dengan tugasnya.
2. Berpengetahuan luas.
3. Mempunyai keyakinan bahwa organisasi akan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui bakat kepemimpinannya.
4. Mengetahui dengan jelas sifat hakiki dan kompleksitas dari tujuan yang hendak di capai.
5. Memiliki stamina (daya kerja) dan antusiasme yang besar.
6. Gemar dan cepat mengambil keputusan.
7. Objektif dalam arti dapat menguasai emosi dan lebih banyak menggunakan rasio.
8. Adil dalam memperlakukan bawahan.
9. Menguasai prinsip-prinsip *human relations*.
10. Menguasai teknik-teknik berkomunikasi.
11. Dapat dan mampu bertindak sebagai penasihat, guru, dan kepala terhadap bawahannya tergantung atas situasi dan masalah yang dihadapi.
12. Mempunyai gambaran yang menyeluruh tentang semua aspek kegiatan organisasi.

Menurut Susatyo Herlambang (2013), beberapa ciri-ciri kepemimpinan yang ideal untuk menjalankan sebuah organisasi, sebagai berikut :

1. Fisik (Physical)

Seorang pemimpin yang ideal mempunyai ciri fisik yang menyenangkan dan terlihat sempurna (*perfect*).

2. Berguna dan Mampu Mengarahkan (*A Sence Of Purposes And Direction*).
Pemimpin yang ideal mempunyai perasaan untuk selalu berguna bagi orang lain dan mampu mengarahkan kepada setiap orang yang bertemu dengannya untuk mengikuti sarannya.
3. Antusias (Enthusiasm)
Dalam setiap kesempatan seorang pemimpin yang ideal akan terlihat selalu antusias dan bersemangat, dalam segala situasi dan kondisi, sehingga orang-orang yang berada disekitarnya akan ikut menjadi bersemangat dan antusias.
4. Bersahabat dan Berpengaruh (*Friendly And Affection*)
Bersahabat dengan semua orang itulah sifat seorang pemimpin ideal, mempunyai pikiran yang selalu positif kepada semua orang, serta memberikan pengaruh positif terhadap lingkungannya.
5. Integritas (Integrity)
Menjaga setiap langkah di dalam hidupnya menjadi seseorang yang berkelakuan baik, jujur, mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
6. Mempunyai Keahlian (*Technical Mastering*)
Dengan adanya ilmu dan banyak belajar dan meningkatkan keahlian di bidang yang sedang anda tekuni maka, orang akan semakin yakin dengan kemampuan anda dalam menyelesaikan setiap tugas.
7. Kemampuan Mengambil Keputusan (Decisivness)
Pengambilan keputusan secara tepat dan cepat merupakan sebuah kemampuan yang terlihat dari sifat seorang pemimpin yang ideal.
8. Kecerdasan (*Intelegence*)
Bekerja cerdas, itulah sifat seorang pemimpin ideal.
9. Kemampuan membimbing (*Teaching Skill*)
Tidak hanya memerintahkan, kemampuan membimbing bawahan untuk mampu dan mau mengerjakan setiap pekerjaan dengan baik, merupakan ciri sifat seorang pemimpin ideal, kesabaran dalam membimbing juga memberikan nilai positif bagi seorang pemimpin ideal.
10. Damai (*Faithful*)
Seorang pemimpin harus bisa menjadikan suasana merasakan kedamaian, maka pemimpin tersebut adalah pemimpin yang ideal.

Sifat-sifat pemimpin yang baik tergantung pada diri pemimpin itu sendiri. Sikap yang seperti apa yang pemimpin gunakan dalam memimpin itu yang dijadikan tolak ukur, apakah pemimpin tersebut baik atau tidak. Setiap orang berhak menilai pemimpin itu baik atau tidak, dan pendapat antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda.

B. Kepala Desa

Menurut Penjelasan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5 dikatakan Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2, Kepala Desa berwenang :

1. Mempimpin penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima perampasan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari keterangan tersebut, bahwa wewenang Kepala Desa sebagai pemimpin di wilayahnya juga berkewajiban memberikan pembinaan kepala masyarakat Desanya, termasuk menanamkan sikap demokrasi di masyarakatnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 3, Kepala Desa berhak :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
5. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam menjalankan tugasnya, Menurut UU No. 6 Tahun Pasal 26 Ayat 4, Kepala Desa berkewajiban :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerja sama koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

- 13) Membina dan melestaiakan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan keterangan di atas, kewajiban Kepala Desa yang harus dipenuhi yaitu menaati seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta memberikan pembinaan kepada masyarakat Desanya.

C. Kepemimpinan Kepala Desa

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah :

1. Memimpin penyelenggara pemerintah desa;
2. Membina kehidupan masyarakat desa;
3. Membina perekonomian desa;
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
7. Mengajukan perencanaan peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan Peraturan Desa (PERDES).
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Mengingat tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat tersebut, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa. Selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Secara individu seorang pemimpin haruslah memiliki kelebihan-kelebihan antara lain sebagai berikut.

1. Kelebihan dalam penggunaan pikiran dan rasio, dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakikat tujuan dan lembaga (desa) yang dipimpinnya, pengetahuan tentang keluhuran asas-asas yang mendasari organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintahan secara rasional, efektif, efisien dan profesional sehingga tercapai hasil maksimal.

2. Kelebihan dalam rohaniah, dalam arti memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral sehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
3. Kelebihan secara fisik, dalam arti dapat memberikan contoh konkret dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya.

Kepemimpinan (*leadership*) secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin, *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin, *followers*), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya sebagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan.

Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja. Oleh sebab itu, ia melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya. Bawahan (yang dipimpin) mengetahui apa yang harus masyarakat kerjakan atas dasar kesadarannya (bukan keterpaksaan) dengan tanpa ragu-ragu mereka melakukan dengan sebaik-baiknya, sekalipun kepala desa tidak berada di tempat misalnya dalam tolong menolong dan gotong royong.

Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Tipe kepemimpinan demokratis dapat terwujud apabila:

1. Proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia (berbudaya dan beradab);
2. Selalu menyinkronkan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi;
3. Senang menerima saran, pendapat dan kritikan;
4. Berusaha mengutamakan kerja sama dengan anggota tim kerja dalam usaha mencapai tujuan;
5. Memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
6. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin (*leader*) dalam kepemimpinannya (*leadership*) dalam Haw.Widjaja (2010:30-32).

D. Sikap Demokrasi

Demokratis merupakan perilaku yang harus kita terapkan dalam bernegara dan di anggap perlu ddi dalam kehidupan masyarakat. Karena perilaku demokratis merupakan hal yang dapat membantu kita dalam berinteraksi dalam lingkungan sekitar kita. Pengertian sikap Menurut teori lawrance Green dan kawan-kawan (1980) menyatakan bahwa “perilaku dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (*behavior causes*) dan faktor diluar perilaku (*non behavior causes*) .”selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu :

- a. Faktor predisposisi (*predisposing factors*), yang mencakup pengetahuan, sikap dan sebagainya.
- b. Faktor pemungkin (*enabling factor*), yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja.
- c. Faktor penguat (*reinforcement factor*), faktor-faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya. (Notoatmodjo, 2003:116).

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) bentukan dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, semokrasi seperti yang dikatakan Abraham Lincoln pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2015:66).

Menurut Sidney Hook demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Hamid Darmadi, 2010:381). Senada pendapat Ubaedillah dan Abdul Rozak (2015:67) yang menyatakan “ demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan”.

Adapun menurut Budiyanti (2007:157) “Demokrasi dalam sistem politik memiliki makna umum, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemauan orang banyak, tanpa mengabaikan hak

golongan kecil agar tidak timbul dikatator mayoritas”,Pemerintahan yang demokrasi adalah pemerintahan yang bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Menurut Ubaedillah dan Abdul Rozak (2015:68) ketiga prinsip demokrasi ini dapat dilakukan, sebagai berikut :

- 1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui demokrasi pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program –programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat yang diberikan kepadanya.
- 2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggaraan negara dapat dihindari.
- 3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Menurut Nurcholish madjid Azra (2003:113) Demokratis bukanlah kata benda, melainkan kata kerja yang mengandung makna, seperti dinyatakan selengkapnya berikut ini”demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis.” Demokrasi dalam kerangka diatas bearti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai *civility* (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang

menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Kemudian Nurcholish madjid merumuskan norma-norma dan pandangan hidup demokratis, antara lain pentingnya Kesadaran akan pluralism, musyawarah, cara haruslah sejalan dengan tujuan, norma kejujuran dalam pemufakatan, pemenuhan kebutuhan secara berencana, kerja sama antar warga masyarakat, dan nilai-nilai dan pengertian-pengertian demokrasi harus dijalankan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan Azra, (2003:113). Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan masyarakat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan dimana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

E. Masyarakat Demokrasi

Menurut Zamroni (2007:48) “Masyarakat yang demokratis adalah kehidupan bersama dimana setiap warga tanpa memandang latar belakang biologis dan sosial memiliki martabat sebagai makhluk manusia yang bebas”. Masyarakat yang demokratis akan memiliki pemerintahan yang demokratis pula, yang bersandarkan pada kekuasaan yang bersumberkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemerintahan demokratis akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga bangsa untuk menentukan keputusan dalam kehidupan bersama. Menurut Dewey (dalam Zamroni, 2007:50) kehidupan bersama yang berdasarkan demokrasi tersebut memerlukan :

- a. Suatu Visi dan kode etik yang dijabarkan secara formal dalam hukum dan undang-undang yang dipatuhi setiap warga negara.
- b. Sistem hukum bersifat mandiri, adil, dan objektif.
- c. Sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- d. Struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menjauhi monopoli dan memberikan kesempatan yang adil kepada semua warga untuk melakukan mobilitas sosial.
- e. Kebebasan berpendapat dan berserikat.
- f. Kebebasan untuk menentukan pilihan secara bebas dan adil.

Bentuk demokrasi masyarakat tersebut akan tumbuh kokoh dalam masyarakat yang memiliki kultur dan nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat,

menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, dan saling menghargai sesama warga negara. Menurut asep sahid dan subhan (2012:130) pembangunan otonomi kebebasan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menjadi kekuatan masyarakat yang biasanya melalui :

1. Mengelurkan perwira-perwira militer yang ikut terlibat dalam persoalan sosial-politik wilayah sipil;
2. Penguatan pembentukan sistem kepartaian yang mendukung terhadap berkembang dan berdayanya sistem parlementer guna terwujudnya keterbukaan pertanggung jawaban kepada masyarakat;
3. Membuka keran-keran partisipasi seluas mungkin agar tuntutan dan dukungan warga dapat teragregasi dengan maksimal;
4. Menumbuhkan dan mengembangka otonomi partisipasi yang selama ini selalu dimobilisasi.

Menurut Cipto (Taniredja, 2013:140) bahwa sikap demokrasi dapat terbentuk apabila terdapat komponen-komponen sebagai berikut :

1. Menggunakan musyawarah untuk penyelesaian masalah dan penetapan kebijakan
2. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan
3. Memberikan kritik dan saran demi kemajuan lingkungan masyarakat
4. Ikut kegiatan musyawarah warga

Menurut hamid Darmadi (2010:359) Demokrasi di masyarakat sebagai suatu cara hidup yang baik antara lain:

Pertama, segala pendapat atau perbedaan pendapat mengenai masalah kenegaraan dan lain-lain yang menyangkut kehidupan negara dan masyarakat diselesaikan melalui lembaga-lembaga negara. Hal ini disebut bahwa penyelesaian itu melembaga, artinya lembaga-lembaga yang erat hubungannya dengan penyelesaian masalah itu melalui wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga negara seperti DPR dan DPRD.

Kedua, Diskusi. Sebagai suatu negara demokrasi dimana rakyat diikuti sertakan dala masalah negara, maka pertukaran pikiran yang bebas, demi terselenggaranya kepentingan rakyat maka diskusi harus dibuka seluas-luasnya. Dalam hal ini maka wadag-wadah lainnya seperti media massa sudah sewajarnya dibina terus menerus.

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat demokrasi merupakan masyarakat yang diberikan kebebasan tanpa memandang latar belakang

biologis dan sosial serta memiliki pemerintah yang demokratis pula dan segala pendapat atau perbedaan pendapat mengenai masalah kenegaraan dan lain-lain dan menyangkut kehidupan negara dan masyarakat diselesaikan melalui lembaga-lembaga negara serta rakyat diikutsertakan dalam masalah negara.